

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk melakukan pembaharuan di berbagai sektor sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna di mata rakyatnya (Van Viertho dalam Tahir & Harakan, 2015). Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah (Miller & Friesen, 1983; Nutt & Backoff, 1993; Osborne & T, 1992). Keberadaan pemerintah daerah dimana pun juga adalah dimaksudkan untuk menghasilkan output. Output penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah adalah berupa percepatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Oleh karena itu inovasi kelembagaan atau inovasi dalam bidang organisasi menjadi penting dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah (Muhammad, 2009). *Dynamic governance* di negara demokrasi sudah merupakan bagian yang integral dari sistem pemerintahan negaranya. Sedangkan, di negara demokrasi baru *dynamic governance* tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari upaya kepemimpinan yang memiliki kapabilitas untuk membangun suatu bangsa yang maju agar mampu bertahan hidup dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kapabilitas

adalah pola pikiran dan cara kerja yang terbentuk dalam waktu yang lama melalui proses pembelajaran (Muhammad, 2009).

Selanjutnya, Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007 : 29-46) mengatakan bahwa kapabilitas *dynamic governance* terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) *thinking ahead* yaitu kemampuan untuk menangkap peranda awal tentang arah perkembangan situasi yang dapat mempengaruhi peranan dan keberadaan suatu Negara, memampukan untuk menentukan visi dan misi yang tepat. (2) *thinking again* yaitu kemampuan dan kemauan untuk menata dan mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar bisa lebih baik kinerjanya. (3) *thinking across* yaitu kemampuan untuk melakukan tolak banding dan keterbukaan untuk melintasi batas agar dapat belajar dari pengalaman orang lain supaya dapat memperkenalkan ide dan konsep baru kedalam lembaga yang dipimpinnya.

Konsep yang disampaikan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007 : 29-46) tentang peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan menyediakan pelayan publik pada pemerintahan di hampir seluruh negara yang mengalami perubahan yang cepat dengan banyak tantangan maupun konflik untuk menghadapi arus globalisasi dan pertumbuhan pembangunan. Dikarenakan kondisi yang penuh dengan dilema, maka tata kelola pemerintah harus senantiasa selalu membuat aturan kebijakan agar dapat memaksimalkan dengan memanfaatkan segala aspek indikator yang ada.

Konsep *dynamic governance* bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam konteks terkini, menjelaskan bahwa kecendrungan Pemerintah Indonesia dalam

menggunakan konsep *dynamic governance* terlihat sejak Juli 2019 yang ditandai adanya beberapa pihak menyarankan agar pimpinan negara sampai ke pemerintahan terkecil mulai mempertimbangkan konsep *dynamic governance*. Konsep tersebut sudah dapat ditemui pada beberapa tata kelola pemerintahan di wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini bertujuan supaya pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan kondisi perubahan yang dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan prioritas di dalam melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik secara minimum. Prioritas dalam perumusan kebijakan publik adalah pola-pola *adaptif policy* melalui jalur *adaptive path*. Sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat menjalankan komponen *thinking ahead*, *thinking across*, *thinking again* secara rinci dan konsisten (Miller & Friesen, 1983; Nutt & Backoff, 1993; Osborne & T, 1992).

Berdasarkan adanya tuntutan agar pemerintah mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti tersebut, kemudian seiring dengan adanya kondisi yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemerintahan Indonesia maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dirasa perlu mengadopsi konsep *dynamic governance* sebagai acuan dan tatanan tata kelola pemerintahan menjadi stabil kembali. Konsep yang memungkinkan pemerintah beserta kebijakannya agar sanggup melakukan penyesuaian dengan situasi yang tidak menentu dan dihadapi dengan berbagai perubahan yang terjadi memiliki tujuan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap relevan efektif dan efisien untuk tujuan jangka panjang.

Berkaitan dengan penerapan konsep dari inovasi kebijakan pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Tanah Datar, maka konsep *dynamic governance* oleh Neo dan Chen tersebut juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan dan mencapai penerapan konsep *dynamic governance* juga terdapat komponen pengungkit yang mendorong proses kapabilitas yang dinamis yaitu *able people* yang artinya orang yang cakap kehadirannya dibutuhkan, karena mereka mampu membawa institusi untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan pola pikir *dynamic governance*. Maka dari itu keberadaan *able people* dalam sebuah pemerintahan, terlebih lagi pada masa-masa terjadinya bencana sangat mempengaruhi pada proses pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan pemerintah dengan cepat dan tanggap sesuai dengan tuntutan publik terutama pada penerapan suatu inovasi pelayanan publik yang berpengaruh besar dan harus diperhatikan pemerintah.

Sebelum memperkuat asumsi Boon Siong Neo dan Geraldine Chen terkait konsep *able people*, dibutuhkan pemahaman terhadap kapabilitas dari *dynamic governance* itu sendiri. Kapabilitas dari *dynamic governance* perlu dimiliki oleh semua pelaku yang terlibat dalam proses pembangunan nasional dan daerah terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelaku kebijakan. Salah satu negara yang berhasil menerapkan *dynamic governance* adalah Singapura. Model yang diterapkan oleh Singapura dalam reformasi pemerintahannya mampu menginspirasi negara-negara lain dengan konteks sosial politik dalam mencapai cita-cita pemerintahan yang efektif,

efisien dan ideal. Model pendekatan dari *dynamic governance* yang telah berhasil diterapkan di Singapura dalam mencapai *good governance* akhirnya mewarnai perkembangan metode dan sistem yang sebagaimana harusnya sektor politik diselenggarakan dengan baik.

Dynamic governance bukan salah satu konsep yang terpisah dari *good governance*. Berangkat dari pemahaman konsep *good governance*, maka Singapura mengembangkan konsep *dynamic governance* yang dirasa sesuai dengan kultur dan pengalaman negara tersebut. Pemerintah Singapura menyadari bahwa *dynamic governance* sangat penting karena menciptakan konteks dan kondisi yang ideal bagi masyarakat. *Dynamic governance* menjadi sebuah tantangan ditengah meningkatnya dinamik globalisasi yang berupaya menampung aspirasi rakyat.

Boon Siong Neo dan Geraldine Chen mengatakan bahwa prinsip pemerintahan, penerapan kebijakan, kualitas kepemimpinan dan stabilitas politik berdasarkan *good governance* akan sulit mencapai pelayanan sektor publik yang memuaskan bagi masyarakat. Konsep yang hanya terpaku pada keberhasilan penerapan *good governance* saja, hanya akan merefleksikan keadaan dimasa lalu dan tidak relevan menjawab tantangan dan perubahan dimasa depan. Untuk itu Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007) merumuskan sebuah konsep pemikiran yang dinamakan *dynamic governance* sebagai pelengkap kunci keberhasilan pemerintahan dalam bidang kebijakan pelayanan publik di Singapura. Menurut Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007) mengingatkan bahwa suksesnya *dynamic governance* bukanlah

konsep tunggal bagi negara sebesar Indonesia. Namun *dynamic governance* sangat mungkin diterapkan di tingkat kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Jika di Singapura mampu menerapkan *dynamic governance* mengapa tidak dengan Indonesia model penerapan *dynamic governance* itu dilakukan. Terbukti sudah ada 3 (tiga) contoh daerah yang telah menggunakan pendekatan *dynamic governance* di Indonesia yaitu: Jusuf Serang Kasim yang merupakan Walikota Tarakan periode 1999-2009 berhasil mengubah Kota Tarakan menjadi pusat jasa perdagangan serta membatasi eksploitasi sumberdaya alam di Kota Tarakan. Jusuf merujuk pembangunan yang dilakukan oleh Singapura sebagai *role model* dalam pembangunan Kota Tarakan secara berkelanjutan. (Boon Siong Neo, Geraldine Chen 2007).

Selanjutnya Kabupaten Jembrana dibawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa yang mendapat label sebagai kabupaten termiskin di pulau Bali mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui program efisiensi dan inovasi yang merujuk kepada penerapan *dynamic governance* di Singapura. (Boon Siong Neo, Geraldine Chen 2007).

Selanjutnya Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharani menjadi kota indah dengan taman-taman yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang baik. Tri risma juga berhasil memaksimalkan penerapan E-KTP sebagai alat untuk memangkas birokrasi yang selama ini menjadi titik rumit bagi pelayanan publik kepada masyarakat kota Surabaya. (Boon Siong Neo, Geraldine Chen 2007).

Kajian kesuksesan *dynamic governance* merupakan metode jitu dalam pengembangan kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia. Salah satu contoh di Provinsi Jawa Barat dalam Jurnal Martoyo dan Nahot Tua Parlindungan Sihaloho (2021) yang berjudul Elemen Sukses Penerapan *Dynamic Governance* di Jawa Barat. Positifnya, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelayanan publik ada di skala prioritas utama, baik pelayanan administratif atau pelayanan sosial. Karena menjalankan *dynamic governance*, maka segala bentuk pelayanan publik dilaksanakan secara kolaboratif dan mengadopsi dasar-dasar *smart city* yaitu dinamis, akomodatif dan solutif. Implementasinya memerlukan sedikitnya 4 elemen sukses yang ditemukan yaitu:

1. *Pentahelix Collabs*, adalah bentuk kerjasama yang melibatkan lima actor pembangunan yaitu akademisi, bisnis (*privat sector*), masyarakat, pemerintah (sektor publik) dan *Neo Government Organization* (NGO).
2. *Creative Funding*, atau pendanaan kreatif adalah suatu metode pembiayaan kebijakan atau tindakan pemerintah tanpa mengandalkan APBN dan APBD yang berasal dari enam sumber yaitu kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU), *Public Private Partnership* (PPP), dana perbankan, dana CSR, obligasi daerah dan dana umat.
3. *Digital Government*, melalui konsep *digital government* (*e-Government*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk membuat pemerintah datang

kepada masyarakat. Opsi ini diwujudkan dengan pengabdian pemerintah provinsi atas pihak-pihak ketiga agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik secara online dengan menyediakan portal pemerintah satu pintu.

4. *Jabar Open Data*. Salah satu prioritas dalam *dynamic governance* pemerintah Jawa Barat adalah memaksa transparansi informasi kepada masyarakat sekaligus mempermudah aksesibilitas data melalui program pelayanan Jabar Open Data yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo Jawa Barat. Gagasan atas program ini merupakan percabangan dari gagasan mengenai implementasi konsep *pentahelix* bahwa kerjasama kolaboratif yang dilakukan perlu melibatkan NGO atau media (martoyo dan nahot, 2021).

Melihat keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam mencapai visi dan misi daerahnya sekaligus membuktikan bahwa *dynamic governance* tidak terjadi secara kebetulan, namun merupakan hasil dari kesungguhan dan ambisi kepala daerah dalam memprioritaskan penerapan kebijakan di bidang pelayanan publik untuk meraih tujuan yang dikehendaki. Jika Kota Tarakan, Kota Surabaya dan Kabupaten Jember telah mampu menerapkan pendekatan *dynamic governance* mengapa tidak dengan Kabupaten Tanah Datar dalam memberlakukan pendekatan tersebut. Sehingga mampu membawa Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu contoh Kabupaten percontohan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik lewat beberapa inovasi yang dilahirkan dari kebijakan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat kesan tidak puas terhadap kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata. Dalam perspektif sosial, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Pemerintahan di Indonesia melalui gerakan reformasi 1998 telah berhasil mewujudkan perlindungan kehendak rakyat untuk mendapatkan posisi yang seimbang dengan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki saluran komunikasi penyelesaian apabila mendapatkan pengabaian hak-haknya oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Penelitian tentang *dynamic governance* sudah banyak dilakukan diantaranya: Gulbrandson (2014), Mitra Adhyatma Kusuma (2015), Muchlas Tahir (2015), Rahman Bakri (2019), Alifatu Lela Murzida (2020), dan Lukman Munawar (2022). Kajian mereka kebanyakan membahas masalah penerapan *dynamic governance* dalam manajemen pemerintahan dan organisasi publik. Amat disayangkan tidak banyak penjelasan diberikan oleh para ahli bagaimana *dynamic governance* digunakan dalam

melihat inovasi pelayanan sektor publik. Padahal dalam perkembangan organisasi publik saat ini, peran inovasi pelayanan menjadi sangat krusial dalam mengembangkan kapasitas organisasi publik.

Penelitian ini bermaksud menambahkan penjelasan tentang bagaimana konsep *dynamic governance* diterapkan dalam inovasi pelayanan publik dalam organisasi pemerintah daerah. Satu kasus yang menarik untuk di elaborasi dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan publik di salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang banyak menerapkan prinsip-prinsip *dynamic governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Inovasi pelayanan publik merupakan trend baru yang digalakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana selama ini dilombakan dengan perangkan tertentu. Kebaruan dalam penelitian ini akan melahirkan bentuk dari penerapan *dynamic governance* dalam inovasi pelayanan publik yang ada di pemerintahan. Inovasi pelayanan publik yang di sinkronisasi dengan *dynamic governance* mestinya menjangkau tujuan yang lebih luas, yaitu membuat percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik berupa replikasi dan transfer pengetahuan serta pelembagaan inovasi pelayanan

publik menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan agar inovasi pelayanan publik dapat mendorong percepatan dan berkelanjutannya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Asumsi dasar peneliti terhadap penelitian ini adalah berdasarkan ketertarikan khusus terhadap *dynamic governance* yang merupakan studi baru dalam tata kelola pemerintahan (*government*). *Dynamic governance* lebih melihat kepada fenomena yang terdiri dari ide dan gagasan yang baru yang di gerakan secara dinamis dalam pemerintahan suatu negara atau daerah. Studi mengenai *dynamic governance* baru dimunculkan sejak tahun 2007 di Singapura dan telah banyak digunakan oleh beberapa daerah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas kebijakan bahkan pelayanan terhadap masyarakat. Konsep *dynamic governance* dinilai mampu mendongkrak percepatan pelayanan secara dinamis dan dapat memangkas politisasi birokrasi yang selama ini sudah berakar di bidang pelayanan pemerintah negara ataupun daerah.

Peneliti tertarik melakukan penelitian *dynamic governance* ini di Kabupaten Tanah Datar dalam hal penerapan inovasi pelayanan publiknya. Alasan ketertarikan peneliti memilih Tanah Datar sebagai Kabupaten tujuan dilakukannya penelitian terkait penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* adalah kabupaten Tanah Datar salah satu Kabupaten yang cukup banyak melahirkan Inovasi Pelayanan Publik seperti OASE, Trisula Dukcapil Membahana, Tanah Datar Di Ujung Jari, Sinova Layani Mentari, SD-WAN dan masih banyak lagi yang nanti akan peneliti bahas pada bab pembahasan serta mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah

pusat maupun provinsi dalam hal inovasi pelayanan publik. Pada umumnya, inovasi pelayanan publik terlahir dari visi, misi dan program unggulan dari Bupati dan wakil Bupati yang dituangkan kedalam renstra Dinas Dukcapil jangka panjang.

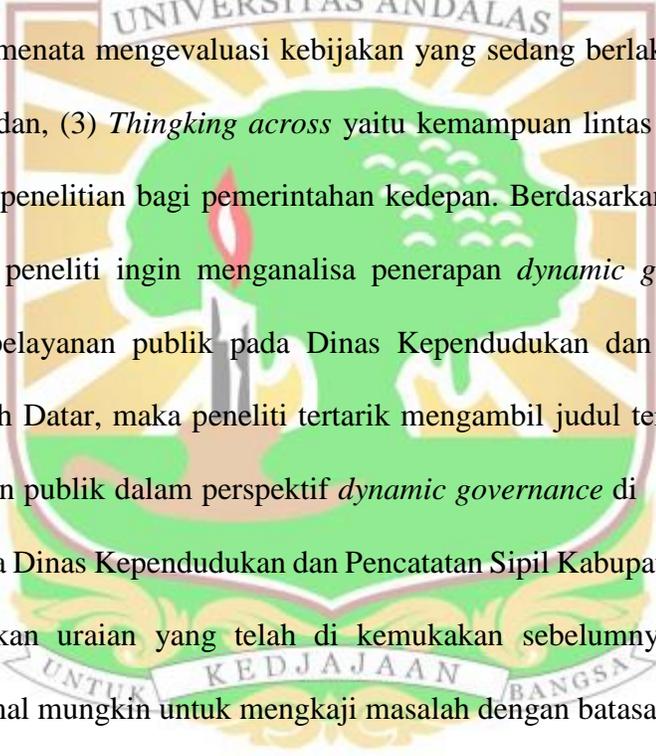
Peneliti berasumsi bahwa dengan adanya inovasi pelayanan publik yang di terapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Datar sehingga mendapatkan beberapa penghargaan baik dari tingkat provinsi ataupun dari pusat agar lebih di tingkatkan dengan menggunakan konsep dari *dynamic governance* dalam menjalankan beberapa indikator dari inovasi pelayanan publik yang peneliti tambahkan pada skema pemikiran. Inovasi pelayanan yang lahir merupakan terobosan pemerintah daerah dalam menjembatani masyarakat memperoleh pelayanan terpadu dalam perspektif yang semakin lama semakin mudah untuk diurus.

Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin banyak dan butuh adaptasi terhadap beberapa daerah yang memiliki jangkauan jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu faktor penting kenapa inovasi pelayanan publik harus dijalankan dengan perspektif *dynamic governance*. Peneliti menilai bahwa konsep *dynamic governance* yang di kemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen yang di lengkapi dengan instrument/indikator dari *dynamic governance* itu sendiri akan mampu mengatasi permasalahan tentang pelayanan publik dampai ke beberapa daerah yang memiliki akses online ataupun akses offline yang memiliki jarak yang cukup jauh dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar.

Maka dari itu, penelitian ini akan menjadi sebuah terobosan baru mengingat penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk penerapan penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* pada Dinas Dukcapil Tanah Datar yang memiliki problem yang sama dengan peneliti sebelumnya yaitu kebijakan yang belum sempurna penerapannya. Pada penelitian ini, peneliti dituntut untuk mendapatkan bagaimana bentuk penerapannya serta faktor yang mempengaruhi dari kajian penerapan *dynamic governance* pada inovasi pelayanan publik di Kabupaten Tanah Datar yang melakukan studi pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar.

Apa yang diterapkan di Kabupaten Tanah Datar hampir mirip dengan konsep *dynamic governance* yang sudah diterapkan beberapa lokasi penelitian terdahulu di Indonesia. Tiga komponen utama dari *dynamic governance* yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* sudah mulai mendekati dari bentuk penerapan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Tanah Datar walaupun memang belum sepenuhnya di terapkan secara tertulis baik dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar maupun terhadap Peraturan Daerah. Peneliti juga ingin melihat bagaimana bentuk dari penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar dan ingin melihat faktor apakah yang mempengaruhi penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar sehingga melahirkan tujuan penelitian berupa keberhasilan dan kegagalan dari

penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dihadapi maka perlu diterapkan pendekatan *dynamic governance* dalam hal inovasi pelayanan publik yang dimana terdapat di dalamnya 3 (tiga) unsur penting yaitu: (1) *Thinking ahead* yaitu kemampuan untuk menentukan visi dan misi yang tepat. (2) *Thinking again* yaitu kemampuan dan kemauan untuk menata mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar bias lebih baik kinerjanya dan, (3) *Thinking across* yaitu kemampuan lintas batas yang wajib dijadikan bahan penelitian bagi pemerintahan kedepan. Berdasarkan ketiga indikator di atas tersebut peneliti ingin menganalisa penerapan *dynamic governance* dalam sektor inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang “Penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Tanah Datar (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar)”.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka peneliti berusaha seoptimal mungkin untuk mengkaji masalah dengan batasan:

1. Bagaimana penerapan inovasi pelayanan publik dari perspektif *dynamic governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar?

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini peneliti membagi tujuan penelitian menjadi dua instrument yaitu keberhasilan dan kegagalan. Indikator keberhasilan merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian dalam sebuah penelitian. Selanjutnya indikator kegagalan merupakan suatu kondisi dimana belum terpenuhinya instrument dari indikator keberhasilan secara efektif dan memunculkan dampak dan akibat yang di timbulkan dari kegagalan tersebut. adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui keberhasilan penerapan inovasi pelayanan publik pada perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kegagalan penerapan inovasi pelayanan publik pada perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik, administrasi dan pemerintahan, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang manfaat dari indikator *dynamic governance* tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul tentang penerapan inovasi pelayanan publik dalam perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Tanah Datar yang melakukan studi pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar.
2. Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik, administrasi dan pemerintahan tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul tentang penerapan inovasi pelayanan publik pada perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Tanah Datar yang melakukan studi pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar.
3. Merupakan sebagai landasan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menciptakan kebijakan inovasi pelayanan publik untuk mengembangkan kualitas manajerial pelayanan publik berbasis *dynamic governance*.